

## PLBN Aruk dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sambas dalam Perspektif Geoekonomi

Audi Rahma Sagita<sup>1\*</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>2</sup>, Putri Hergianasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

\*Email Korespondensi: audirahma01.bky@gmail.com

**Abstract:** This paper aims to review the key role of sambas county governments in driving economic growth through the gate of a border post Aruk. This study focuses on geoeconomic theory, integrating geographical factors that affect the economic dynamics of the region, particularly those that are associated with existence the border post of Aruk. The Research method employ a qualitative approach with data collection through interviews, official government website observations, and document analysis. The research focus includes evaluating the role of the sambas district government in infrastructure development in the region of the border post in Aruk And other strategic steps to stimulate the growth and economic growth of sambas district. The results are expected to provide insight into the extent to which the sambas county government's role in supporting the economic development of the region through the border post of Aruk, and how the economic aspects can be used to maximize the economic potential in the region. The implications of these findings are expected to contribute to formulating more effective and sustainable policies to drive economic growth in the region around the border post of Aruk.

**Keywords:** Development, regional economy, the border post, the role of government, geoeconomics

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran kunci pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pintu Gerbang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. Penelitian ini menitikberatkan pada teori geoekonomi, mengintegrasikan faktor-faktor geografis yang berpengaruh pada dinamika ekonomi daerah, terutama yang terkait dengan keberadaan PLBN Aruk. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi situs resmi pemerintahan, serta analisis dokumen. Fokus penelitian mencakup evaluasi peran pemerintah Kabupaten Sambas dalam pembangunan infrastruktur di kawasan PLBN Aruk dan langkah-langkah strategis lainnya untuk merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui PLBN Aruk, serta bagaimana aspek geoekonomi dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitar PLBN Aruk.

**Kata Kunci:** Pembangunan, Ekonomi Daerah, PLBN, Peran Pemerintah, Geoekonomi

### PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan yaitu suatu wilayah yang terletak dekat dengan wilayah perbatasan negara lain dan dimana masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan mempunyai peluang besar untuk secara langsung melakukan interaksi dengan negara lain. Oleh karena itu, kawasan perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam pemanfaatan sumber daya, kedaulatan, serta penjagaan keamanan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai letak dan peran strategis khususnya pembangunan ekonomi wilayah perbatasan negara sebab berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Purnamasari et al., 2016). Wilayah Kabupaten Sambas memiliki luas 6.394,70 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sekitar 647,80 ribu jiwa dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas ini karena merupakan salah satu fokus kawasan strategis, di

mana kawasan yang secara nasional berkaitan dengan hajat kehidupan banyak orang (Purnamasari et al., 2016).

Merujuk pada penelitian terdahulu, terdapat penilaian dan asumsi masa lalu yang melekat pada wilayah perbatasan, yaitu wilayah perbatasan dinilai sebagai daerah persembunyian pemberontak, penyelundup, serta kegiatan ilegal lainnya (*illegal fishing, trafficking, dan illegal logging*), sehingga perlu diawasi secara ketat (Ishak, 2003). Masyarakat Indonesia yang menetap di kawasan perbatasan menghadapi tantangan hidup yang sulit, karena letak geografisnya yang jauh dari ibu kota negara dan ibu kota provinsi, sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan hidup dengan keterbatasan akses sumber daya dan pusat-pusat pelayanan publik lainnya (Firdaus, 2019; Sudiar, 2015). Menurut Firdaus (2019), hingga saat ini terdapat dua permasalahan strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia, yaitu isu pengelolaan perbatasan negara dan pengelolaan kawasan perbatasan. Minimnya pengembangan dan pemanfaatan potensi serta infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, adalah permasalahan umum yang terjadi di sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia (Firdaus, 2019)

Kondisi ini membuktikan bahwa, kawasan perbatasan belum dikelola dengan baik dan belum adanya konsep pembangunan yang jelas, menyeluruh, dan terpadu, sehingga pembangunan yang terlihat hanya pembangunan parsial dengan pendekatan yang sangat spesifik sektoral (Mufizar, 2013). Ishak (2003) menjelaskan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pembangunan di kawasan perbatasan karena sudah berorientasi sebagai “halaman belakang negara”, serta hanya lebih mengutamakan pendekatan keamanan lalu mengenyampingkan pendekatan kesejahteraan (Ishak, 2003). Apabila melihat pada kawasan Kabupaten Sambas, secara umum juga kurang didukung oleh fasilitas ekonomi dan aksesibilitas lainnya, sehingga banyak masyarakat yang tinggal kawasan perbatasan memilih untuk beralih ke Malaysia sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Husnadi, 2006).

Sejumlah arahan strategi pembangunan telah diterbitkan di daerah perbatasan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan kawasan perbatasan sebagai garda depan negara, seperti telah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) (JDIH BNPP, 2010); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (DPR RI, 2008); Peraturan Badan Nasional Perbatasan Negara Nomor 1 Tahun 2015 (JDIH BNPP, 2015); Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (JDHIN, 2020). Kebijakan pemerintah ini digunakan sebagai acuan tata kelola perbatasan dan kawasan perbatasan yang tertib, maju, dan aman sehingga kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan persoalan ini, Presiden Joko Widodo membentuk Nawa Cita, yaitu sembilan agenda prioritas untuk Indonesia yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 (KOMINFO, 2015). Terdapat dua program kegiatan penting dalam Nawa Cita untuk wilayah perbatasan, yaitu yang terdapat dalam Nawacita ke-3 dan Nawacita ke-7. Nawa Cita ke-3 mengagendakan terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa sebagai kerangka negara kesatuan, sehingga pembangunan tidak terpusat di perkotaan melainkan harus dilakukan pada seluruh pelosok dan pinggiran di Indonesia, sedangkan Nawacita ke-7 mengagendakan untuk menggerakkan sektor-sektor strategis dalam negeri sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi (Purnamasari et al., 2016). Sebagai implementasi Nawa Cita tersebut, pemerintah mengucurkan Dana Desa untuk membangun wilayah perbatasan. Pada masa pemerintahan

Joko Widodo telah rampung infrastruktur berupa jembatan, jalan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan. Pada tanggal 17 Maret 2017, Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan PLBN Aruk yang berada di Desa Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan harapan agar PLBN Aruk dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (KEMENKEU, 2020).

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia adalah fasilitas keamanan yang berada di perbatasan negara dilengkapi dengan pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai untuk mengawasi pergerakan manusia, barang, dan kendaraan yang masuk ataupun keluar di wilayah Indonesia dan memastikan semua orang dan barang yang memasuki wilayah perbatasan Indonesia mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021). Untuk mengoptimalkan pemanfaatan PLBN Aruk, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kementerian ataupun lembaga terkait harus bersinergi menjadikan PLBN Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh Kabupaten Sambas. Menurut, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat (2020), untuk merealisasikan wacana tersebut, ada beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu: 1) Malaysia masih menganggap PLBN Aruk sebagai jalur perdagangan tradisional, sedangkan pada realitanya PLBN Aruk merupakan jalur perdagangan ekspor/impor. Hal ini akan mempersulit ekspor Indonesia ke Malaysia; 2) Komoditas ekspor ke Malaysia masih berupa produk pertanian dan perikanan yang belum diolah sehingga *value added* komoditasnya masih rendah; 3) Terdapat perbedaan harga antara produk Indonesia dan Malaysia, sehingga kuantitas produk Malaysia di kawasan perbatasan lebih banyak dibandingkan produk Indonesia; 4) Perlu dilakukan optimalisasi promosi ke Malaysia seperti optimalisasi pasar di kawasan PLBN Aruk, misalnya mengoptimalkan pasar di wilayah PLBN Aruk dengan menawarkan produk unggulan Kalimantan Barat; 5) Perlunya pembangunan infrastruktur penunjang untuk pariwisata di Kabupaten Sambas, seperti jalan dan jaringan telekomunikasi serta promosi obyek-obyek wisata; dan 6) Perlu memaksimalkan sarana prasarana dan promosi untuk Wisma Indonesia (Kemenkeu, 2020).

Apabila ditinjau berdasarkan lokasi, kawasan PLBN Aruk merupakan lokasi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan perbatasan Malaysia, sehingga memiliki peluang besar pula bagi masyarakat melakukan relasi langsung dengan Malaysia. Oleh karena itu, untuk dapat melihat perkembangan ekonomi di kawasan PLBN Aruk dapat digunakan analisis berdasarkan teori geoekonomi yang secara umum merupakan studi terkait hubungan antara faktor ekonomi dan geografis, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara (Priyono, 2020). Salah satu ahli yang terkenal dalam studi geoekonomi adalah Klaus Solberg Soilén (2012). Menurut Soilén (2012), geoekonomi merupakan studi terkait aspek budaya, keruangan, dan strategi sumber daya yang bertujuan mendapatkan keuntungan berkepanjangan (Soilén, 2012; Priyono, 2014).

Terdapat 10 konsep strategi pembangunan ekonomi berdasarkan perincian geoekonomi menurut Soilén (2012), yakni kepercayaan, lokasi, sumber daya, bobot penekanan, kekuatan, basis, keamanan, komunikasi, dan ekspansi. Sepuluh konsepsi geoekonomi menurut Soilén tersebut, merupakan aspek yang paling cocok untuk menganalisis kawasan perbatasan PLBN Aruk. 1) Konsep kepercayaan berupa sasaran, tujuan, dan misi baik dari pemerintahan Kabupaten Sambas maupun PLBN Aruk terkait pembangunan daerah; 2) Konsep lokasi digunakan karena akan menjadi titik fokus utama dalam menganalisis geopolitik dan ekonomi di kawasan perbatasan PLBN Aruk; 3) Konsep sumber daya, yaitu kekuatan finansial dan kepemilikan; 4) Konsep bobot penekanan, berkaitan dengan keunggulan yang meliputi jumlah dan kualitas penduduk, serta pangsa pasar; 5) Konsep potensi

merujuk pada sumber daya dan peluang ekonomi di kawasan perbatasan PLBN Aruk; 6) Konsep struktur, berkaitan dengan struktur dan kultur pemerintah, yaitu dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Sambas; 7) Basis, mencakup aspek bangunan, lahan/tanah, serta aset; 8) Konsep Keamanan, berkaitan dengan kewenangan yang sah menurut hukum; 9) Konsep komunikasi, perangkat bahasa; 10) Konsep ekspansi, merupakan produk yang dapat diekspor.

Berdasarkan pendahuluan diatas, tulisan ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana pembangunan PLBN Aruk terhadap perkembangan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sambas dengan menggunakan teori geoekonomi di mana untuk menganalisis bagaimana faktor ekonomi dan geografis secara langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara.

## **METODE PENELITIAN**

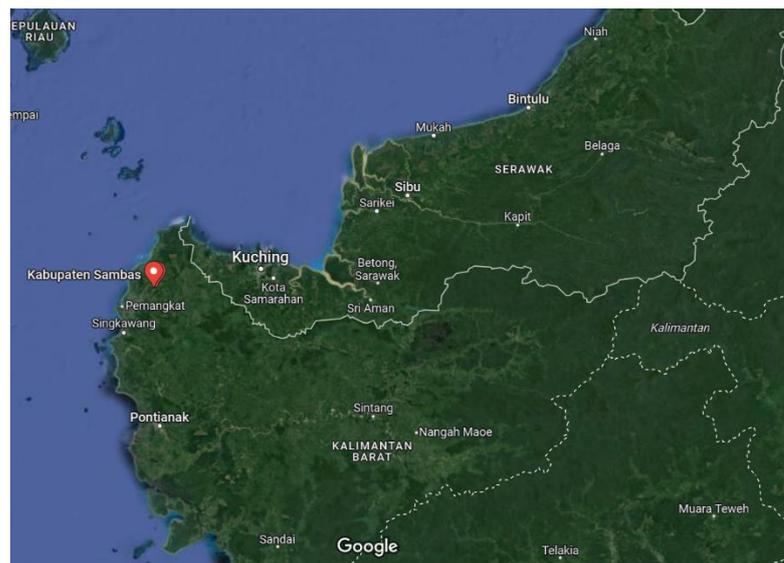
Metode kualitatif merupakan suatu cara menggambarkan serta menganalisis suatu hal, peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, persepsi, baik secara individual maupun kelompok (Syaodih, 2007). Penyusunan metode kualitatif ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber internet melalui situs resmi BPS, Pemerintah Kabupaten Sambas, BNPP, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan Indonesia serta menggunakan metode wawancara, yaitu peneliti berkomunikasi langsung dengan sumber data untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode wawancara dilakukan baik melalui telepon maupun tatap muka agar peneliti mendapat informasi yang akurat dan spesifik mengenai dinamika dan perkembangan di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas dan PLBN Aruk. Wawancara akan dilakukan kepada petugas PLBN Aruk, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sambas, dan BAPPEDA Kabupaten Sambas.

Data dianalisis menggunakan Teori Geoekonomi dengan menguraikan bagaimana dinamika sebelum dan sesudah pembangunan PLBN Aruk dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Sambas. Terdapat tiga teknik analisis data yang dipakai guna menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1994). Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data mengenai dinamika kawasan PLBN Aruk dan potensi perekonomian daerah Kabupaten Sambas. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara merangkum dan mengambil data-data pokok. Selanjutnya, data yang telah direduksi dituangkan dan dianalisis menggunakan Teori Geoekonomi dalam bentuk teks yang bersifat naratif sehingga dapat menjawab pertanyaan yang relevan. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstelasi Ruang Geografis PLBN Aruk**

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia. Untuk melindungi dan mengembangkan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara, pemerintah sudah mendirikan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, salah satunya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas (Lindia Mayona et al., 2016). Awal mulanya, PLBN di Aruk masih berupa PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas), namun pada tahun 2016 dilakukan renovasi menjadi bangunan PLBN Aruk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 terkait Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan kemudian diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 17 Maret 2017 dengan secara sah berjalan di bawah naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemenkeu, 2020; Kemenkeu, 2020; BNPP, 2018).



**Gambar 1.** Letak Geografis Kabupaten Sambas 2024

**Sumber:** Google Maps

Wilayah PLBN Aruk terbagi menjadi dua, yaitu Terminal Barang Internasional dan PLBN Terpadu Aruk. PLBN Terpadu Aruk berdiri dengan tanah seluas 26,2 Ha, sementara Terminal Barang Internasional Aruk dibangun dengan tanah seluas 2,2 Ha yang saat ini telah selesai dibangun (Kemenkeu, 2020). Terdapat sarana prasarana pengawasan dan pelayanan dalam gedung utama PLBN Aruk berupa pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan bea cukai, karantina pertanian dan ikan, dan karantina kesehatan. Sedangkan di luar gedung PLBN terdapat sarana dan prasarana berupa pos pemeriksaan kendaraan lintas batas negara, pos desinfektan kendaraan kargo lintas batas negara, CCTV 360 pengawasan kawasan PLBN Aruk, pos desinfektan kendaraan kargo lintas batas, pos pemeriksaan kendaraan dan gudang sita, dan pos keamanan terpadu (BNPP, 2022). Selain itu, PLBN Aruk juga dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang berupa Wisma Indonesia dan Mess pegawai, gereja, masjid, pasar wisata Aruk, serta lahan parkir.



**Gambar 2.** Sebelum Pembangunan PLBN Aru

**Sumber:** Tribun Sambas (2015)



**Gambar 3.** Sesudah Pembangunan PLBN Aruk

**Sumber:** BNPP RI (2023)

Secara operasional PLBN memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder (Kemenlu, 2021). Fungsi primer dari PLBN terdiri dari fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*). Sementara itu fungsi sekunder dari PLBN adalah untuk pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam fungsi primernya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi tempat bagaimana negara melakukan kontrol terhadap keluar dan masuk barang dan orang dari dari luar atau dari dalam wilayah teritorial negara, sehingga menyangkut di dalamnya persoalan keamanan dan prosedur imigrasi yang mencakup perlintasan manusia serta berkaitan dengan bea

cukai yang berhubungan dengan perlintasan barang untuk mengurangi resiko barang atau penumpang yang datang dan masuk ke wilayah suatu negara. Sedangkan dari fungsi sekundernya, pembangunan PLBN yang modern dan terintegrasi diharapkan dapat menimbulkan *trickle-down effect* terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Dampak tersebut antara lain: a) peningkatan mobilitas orang, kendaraan, barang dan/atau jasa antar negara; b) peningkatan perekonomian di desa-desa lokasi PLBN, di *rest area*, dan disepanjang jalan yang dilalui kendaraan antarnegara; c) perluasan peluang ekonomi bagi pengusaha di luar desa perbatasan; d) peningkatan arus wisatawan antar negara, termasuk WNI (Kemenlu, 2021).

Untuk menunjang PLBN Aruk dalam melayani komoditas ekspor dan impor, pemerintah Kabupaten Sambas merencanakan pembangunan *Dry Port* atau *Land Port* di kawasan PLBN Aruk. Kemudian, guna memaksimalkan kinerja *Land Port*, pemerintah Kabupaten Sambas turut merencanakan pelayanan *Road Tax* di PLBN Aruk dengan harapan agar semakin mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah Kabupaten Sambas. Menurut salah satu petugas pemerintah Kabupaten Sambas (2018), alasan perlunya dihadirkan *Road Tax* di PLBN Aruk ini karena, banyaknya hasil pertanian maupun Perkebunan daerah yang diekspor melalui PLBN Entikong, sedangkan jarak tempuhnya sangat jauh dan akan semakin meningkatkan biaya produksi dan operasional (Humas Kabupaten Sambas, 2018).

Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (ibukota Kuching) dapat mengoptimalkan peran PLBN Aruk untuk pembangunan perekonomian karena Kabupaten Sambas mempunyai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor ekspor seperti produk pertanian dan kelautan (BNPP, 2020; Kemenkeu 2020). Selain itu Kabupaten Sambas juga mempunyai tempat wisata yang sangat menarik seperti Pantai Temajuk serta wisata di kabupaten Sajingan Besar antara lain Riam Banokang, Riam Merasap dan Goa Santok (Kemenkeu, 2020). Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas harus memaksimalkan pemanfaatan PLBN Aruk untuk pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan kemandirian perekonomian dengan menggerakkan sektor-sektor strategi perekonomian domestik Sambas sesuai dengan Nawacita ketujuh (Kemenkeu, 2020).

### **Dinamika Pengelolaan Kawasan PLBN Aruk**

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Daerah PLBN Aruk (2023) menyatakan bahwa sebelum berdirinya PLBN Aruk, infrastruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas masih sulit dan belum memadai, terutama infrastruktur jalan. Dengan jarak sekitar 90 km dari Aruk ke Sambas (Ibu Kota Kabupaten), memerlukan waktu sekitar satu hari perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap harga barang serta komoditas yang diperdagangkan, sehingga masyarakat di sekitar perbatasan beralih untuk menjual dan mencari kebutuhan pokok di negara tetangga, yaitu Malaysia. Hal tersebut mengakibatkan posisi tawar yang rendah. Sebagai contoh, komoditas hasil kebun yang di jual ke negara sebelah ditentukan secara sepihak oleh pembeli, karena jika tidak menerima sesuai kesepakatan harga, tidak mungkin barang dagangan tersebut dibawa kembali ke kampung.

Berdasarkan penelitian oleh Firdaus (2019), menunjukkan bahwa pembangunan PLBN Aruk memberikan dampak positif dalam ekonomi di mana masyarakat lebih mudah dan murah dalam mengakses komoditas pasar. Kemudahan dalam akses ke fasilitas publik dan komoditas pasar juga didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik dengan adanya pembangunan PLBN Aruk (Firdaus, 2019). Menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Daerah PLBN Aruk (2023), pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik menjadikan jarak tempuh dari Sambas

sampai ke Aruk, cukup memerlukan waktu 1,5 - 2 jam perjalanan dengan didukung oleh sarana pendukung seperti listrik, jaringan telekomunikasi dan internet, air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Perkembangan sarana penunjang dan infrastruktur setelah dibangunnya PLBN juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh Jamaludin, Dr. Adon Nasrullah (2016) yang menyatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan upaya untuk memajukan serta meningkatkan nilai yang sudah ada. Dengan demikian di bangunannya PLBN saat ini, semestinya dapat menciptakan peningkatan perkembangan sarana penunjang dan infrastruktur di Kabupaten Sambas seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian akan mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan serta mendorong peningkatan ekspor melalui *border/pintu* perbatasan PLBN Aruk.

Selain itu, setelah adanya pembangunan PLBN Aruk, destinasi wisata alam di Kabupaten Sambas juga mengalami peningkatan. Kabupaten Sambas sekarang memiliki destinasi pariwisata yang sangat potensial seperti pesona ujung negeri Temajuk, wisata alam Sebusus yang menampilkan hewan-hewan langka dan dilindungi, wisata Jawai Laut, kuliner Danau Sebedang, monumen warisan budaya Istana Alwatzikhoebillah, wisata Piantus yang menampilkan bukit dan rotan, dan Kampung tenun Sumber Harapan. Keberagaman destinasi wisata seperti ini sangat potensial bagi Kabupaten Sambas karena sektor ini dapat meningkatkan devisa negara dengan menarik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) untuk melakukan kunjungan wisata langsung di Kabupaten Sambas. Kekayaan sumber daya alam ini juga dapat bermanfaat bagi sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Sambas karena dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi SDM untuk mengelola SDA yang ada. Selain itu sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan penghasilan bagi wisata alam, melainkan juga restoran, transportasi, tempat rekreasi, dan jasa akomodasi atau penginapan. Dengan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru ini telah meningkatkan angka kunjungan wisatawan dari tahun demi tahun yang di mana berkontribusi meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sambas (Annisa & Najicha, 2021)



**Gambar 4.** Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Kabupaten Sambas 2021

**Sumber:** Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas (2021)

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Daerah PLBN Aruk (2023) menyampaikan, bahwa hadirnya PLBN Aruk semakin memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sambas. Saat ini, komoditas yang di ekspor ke Malaysia, baik hasil pertanian maupun perikanan masih dalam bentuk segar. Diharapkan kedepannya, dengan keterlibatan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah, agar mendorong sektor-sektor usaha seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/ pengolahan *Home Industri*, sehingga memberikan nilai tambah terhadap

komoditas yang ekspor. Selain itu, juga perlu membangun kawasan industri di Kawasan perbatasan. Mengingat PLBN Aruk, saat ini melayani wilayah Singkawang, Bengkayang, Sambas (SINGBEBAS) yang nantinya wilayah tersebut akan diperluas menjadi Mempawah. Wilayah Mempawah dipilih karena di Kabupaten Mempawah terdapat Pelabuhan Laut Internasional (Kijing). Kedepannya, proyeksi ekonomi memungkinkan hasil-hasil produk yang ada di Pulau Jawa seperti *furniture* terutama kerajinan jati bisa di ekspor ke Malaysia melalui PLBN Aruk, dalam bentuk setengah jadi dan kemudian proses *finishing* dapat dilakukan di kawasan perbatasan Aruk. Hal tersebut, tentu saja akan berdampak positif, karena selain menyerap tenaga kerja maka akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Peningkatan perdagangan dan pasar Kabupaten Sambas ini didukung oleh peran Pemerintah, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menciptakan program unggulan untuk Kabupaten Sambas yaitu *One Village One Product* (OVOP).

Dengan demikian, pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas menjadi hal yang sangat bermanfaat dan potensial karena akan meningkatkan keluar-masuk barang dan manusia melalui pintu gerbang lintas batas negara yang berarti akan mendongkrak sektor perdagangan, yang dengan kata lain dapat membuka jalan perekonomian di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas.

Namun ditengah pembangunan oleh Pemerintah Daerah setelah Pembangunan PLBN Aruk ini, masih terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yaitu: 1) Masih kurangnya infrastruktur dalam kondisi prima untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas; 2) Tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan memburuk akibat dampak pandemi Covid-19; 3) Jumlah penduduk miskin meningkat dan angka kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional; 4) Indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat masih relatif rendah karena rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup; 5) Indeks risiko bencana daerah dan kerusakan lingkungan masih tinggi akibat kegiatan pembangunan, bencana alam, dan kegiatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan 6) Penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik masih belum optimal; 7) Masih tingginya risiko dan tingkat permasalahan sosial di masyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat; 8) Pengembangan di daerah perbatasan belum optimal sehingga masih terdapat disparitas antar daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas, 2021; Satono, 2023).

### Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas

Menurut Mariati (2022), perekonomian suatu daerah dalam wilayah yang lebih luas dapat diketahui melalui parameter besarnya kontribusi pendapatan daerah dalam konteks yang lebih luas. Dengan menghitung kontribusi PDRB Kabupaten Sambas, dapat diketahui perkembangan perekonomian Kabupaten Sambas.

**Tabel 1.** Kontribusi PDRB Kab. Sambas, 2014-2017, 2018-2021, atas harga konstan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Sebelum PLBN	Sesudah PLBN	Selisih Kenaikan(Persen)
	Tahun 2014-2017 (Dalam Juta Rupiah)	Tahun 2018-2021 (Dalam Juta Rupiah)	
Kab. Sambas	11.542.035	13.494.262,2	14%

**Sumber:** BPS

Melalui angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2014-2017 sampai 2018-2021, Kabupaten Sambas memiliki kontribusi PDRB rata-

rata sebesar 14% dalam mengembangkan kondisi perekonomian daerah. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sambas terhadap perkembangan perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, namun masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya hilirisasi terhadap potensi sumber daya lokal secara optimal, serta penguatan pengembangan ekonomi lokal untuk memacu dan meningkatkan daya perekonomian yang di mana secara langsung akan berdampak terhadap kondisi perekonomian kawasan PLBN Aruk. Pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sambas juga didukung oleh lokasi yang strategis sebab berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, perlu adanya dorongan pada sektor-sektor yang menjadi unggulan Kecamatan Sajingan Besar. Selain dapat dikembangkan, sektor ini juga akan berdampak pada berkembangnya sektor lain, serta mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan ekspor (Purnamasari et al., 2016). Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas (2023), produk sektor pertanian dan perikanan merupakan komoditas perdagangan yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sambas secara umum, khususnya pasca dibangunnya PLBN di Kecamatan Sajingan Besar. Pernyataan Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas juga didukung dengan data BPS, di mana pada tahun 2014-2017 hingga 2018-2021, sektor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sambas adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat menunjang pengembangan sektor lain, khususnya industri pengolahan di mana pengembangan industri pengolahan menjadi salah satu agenda pengembangan kawasan perbatasan negara yang berpusat di Kecamatan Sajingan Besar dimana PLBN berlokasi dan Kawasan Komersial Aruk.

**Tabel 2.** Sektor Utama Kabupaten Sambas  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	Sebelum pembangunan PLBN Aruk (2014-2017)	Sesudah pembangunan PLBN Aruk (2018-2021)	Selisih Kenaikan (Persen)
Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan	3956236.873	4750314.393	17%

**Sumber:** BPS

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022, tingkat perekonomian Kabupaten Sambas yang sangat kecil ini, selain disebabkan oleh tantangan-tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, juga disebabkan oleh faktor bencana tak terduga, yaitu pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan pelemahan di berbagai sektor ekonomi. Untuk memulihkan situasi akibat dampak pandemi COVID-19 yang juga menjadi isu strategi daerah Kabupaten Sambas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mengedepankan pembangunan wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2022 dengan mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Sambas Maju dan Unggul di Kalimantan Barat”, dengan prioritas pembangunan antara lain:

Pertama, pemulihan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan iklim investasi, peningkatan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selaras dengan program: a) Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) yakni mengedepankan produk unggulan lokal dalam sinergi investasi; b) Program RUSMINAH, yaitu pengaturan perizinan yang memberikan pelayanan dan bantuan bagi pelaku usaha; c) Program SIPINDU, yaitu program peningkatan perekonomian masyarakat melalui simpan pinjam terpadu,

dengan tujuan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha mikro dan kecil, memperkuat pembiayaan usaha bagi UMKM dan menyediakan infrastruktur penunjang; d) Program *GREEN GROWTH*, yaitu program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dibarengi dengan program sebagai berikut: a) Program Pelayanan Dikatan, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; b) Program Pemuda Siap Kerja, yaitu program guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar serta aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat dibarengi dengan program PasminumMas yakni program penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Keempat, peningkatan mutu pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah secara simultan dalam program *e-Government* yakni program untuk mendorong peningkatan mutu dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelima, penguatan kondisi ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan beragama dan wawasan kebangsaan, yang bersamaan dengan program Bentuk Imam, yaitu program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama berbasis pada nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma sosial berlaku (Satono, 2023).

### PLBN Aruk dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sambas

Walaupun kawasan PLBN Aruk kerap diperhadapkan dengan beberapa persoalan, namun kawasan perbatasan PLBN Aruk memiliki kekuatan besar untuk bisa dikembangkan, baik dalam kekuatan sumber daya alam maupun kekuatan dalam sektor perdagangan, wisata, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal ini, kawasan perbatasan PLBN Aruk memiliki kekuatan unggulan sumber daya alam berupa hasil pertanian, perhutanan, dan perikanan sebagai komoditas ekspor melalui PLBN Aruk. Berdasarkan data dari BPS terkait potensi ekspor pelayanan kepabeanaan di PLBN Aruk setelah pandemi (2022), komoditas ekspor unggulan dalam sektor perikanan yakni ubur-ubur, kerang dara, kerang sumpil, dan kerang kepah. Sedangkan komoditas ekspor unggulan dalam sektor pertanian yaitu kelapa tua, pisang, petai, dan semangka.

**Tabel 3.** Tabel Ekspor Produk Perikanan Tahun 2022 melalui PLBN Aruk

No.	Bulan	Ekspor		
		Jenis Komoditas	Volume	Nilai
1	Mei	Ubur-ubur	33600 kg	384.384.000
2	Juni	Ubur-ubur	43200 kg	494.208.000
3	Juli	Ubur-ubur	28800 kg	329.472.000
		Kerang Dara	700 kg	8.050.000
		Kerang Sumpil	570 kg	6.203.000
		Kerang kepah	190 kg	1.881.000
<b>Jumlah</b>			107.060 kg	Rp1.553.670.000

Sumber: BPS 2022

**Tabel 4.** Ekspor Produk Pertanian Tahun 2022 melalui PLBN Aruk

No	Jenis Komoditas	Volume	Nilai
1	Jeruk	800 kg	4.000.000
2	Bengkuang	500 kg	1.000.000
3	Buah Naga	1750 kg	13.275.000
4	Pisang	10100 kg	20.634.000
5	Buncis	378 kg	5.992.000
6	Jambu	100 kg	1.400.000
7	Jengkol	200 kg	600.000
8	Kacang Panjang	80 kg	800.000
9	Kacang Tanah	98 kg	588.000
10	Kunca	100 kg	500.000
11	Labu Kuning	1272 kg	2.162.400
12	Nanas	3400 kg	17.000.000
13	Salak	400 kg	4.000.000
14	Semangka	3500 kg	17.500.000
15	Petai	17050 kg	178.260.000
16	Ubi Jalar	1375 kg	5.700.000
17	Kelapa Tua	117000 kg	294.290.000
<b>Total</b>			<b>Rp589.801.400</b>

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan tabel di atas, komoditas pertanian dan perikanan yang diekspor melalui kepabeanaan PLBN Aruk masih berupa produk mentah yang belum melalui proses pengolahan, sehingga nilai eksportnya masih rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam usaha pemanfaatan dan pengembangan produktivitas sumber daya alam di Kabupaten Sambas. Pemerintah dan pelaku usaha dapat melakukan kerja sama untuk melakukan hilirisasi sebelum produk kemudian di ekspor melalui PLBN Aruk agar nilai ekspor yang dicapai juga tinggi.

Namun, berdasarkan dinamika di kawasan PLBN Aruk dan analisis ekonomi Kabupaten Sambas, menghasilkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur Kabupaten Sambas dan sarana prasarana penunjang lainnya di PLBN Aruk yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih belum maksimal. Semestinya, dengan kekayaan potensi sumber daya alam yang jauh lebih tinggi dibanding Malaysia, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam harusnya bisa dikelola di Kabupaten Sambas sendiri. Dengan mengekspor produk mentah di negara Malaysia, maka proses produksi akan dilakukan oleh negara Malaysia, kemudian produk Malaysia tersebut akan dijual dengan harga yang lebih terjangkau dan dibeli kembali oleh masyarakat atau pelaku usaha di kawasan Kabupaten Sambas.

Dengan jarak yang lebih dekat dengan Malaysia, tentunya masyarakat di kawasan PLBN Aruk beralih untuk membeli produk dari Malaysia, karena selain harganya lebih murah, kualitasnya juga lebih baik dari produk lokal yang bahkan harganya bisa lebih mahal. Kondisi tersebut akan menciptakan efek domino pada kesenjangan dan ketergantungan terhadap negara Malaysia, sehingga sulit untuk meningkatkan potensi dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sambas.

Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sambas dan petugas PLBN Aruk harus bekerja sama untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan berpotensi dalam mendukung dan mempercepat proses pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas, terutama terkait memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur daerah dan fasilitas penunjang lainnya di wilayah PLBN Aruk.

Koordinasi yang baik antara pihak berwenang setempat dan petugas PLBN Aruk menjadi kunci dalam merancang inisiatif yang tidak hanya efisien tetapi juga berdaya tahan terhadap dinamika yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan petugas PLBN Aruk dapat membentuk forum dialog reguler dan mekanisme konsultasi untuk merancang strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi, termasuk dampak pandemi dan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi proyek-proyek ekonomi. Langkah-langkah konkret seperti pemetaan sumber daya, identifikasi potensi ekonomi lokal, dan penyusunan rencana aksi bersama perlu ditempuh guna memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, implementasi strategi ini juga dapat diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha lokal, masyarakat, dan pihak-pihak non-pemerintah (Hutabarat, 2022)

Dengan melibatkan berbagai *stakeholders*, dapat dihasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. Dalam strategi jangka panjang, kemitraan antara Pemkab Sambas dan petugas PLBN Aruk bukan hanya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, namun juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan untuk memperkuat sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dan menghasilkan terobosan-terobosan strategis yang mendukung visi pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas.

### **Fungsi PLBN Aruk Dalam Perspektif Geoekonomi**

Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis yang menjadi aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan beberapa karakteristik di mana secara politik PLBN menjadi manifestasi kedaulatan negara, menjadi wajah negara di beranda depan negara, sebagai bukti kehadiran negara dalam melayani warganya dalam aktivitas lintas batas serta menunjukkan penguasaan atas ruang wilayah suatu negara. Apabila diterapkan dalam sepuluh aspek geoekonomi oleh Soilén (2012), PLBN dapat dilihat sebagai kekuatan atau penguatan potensi kawasan perbatasan di mana PLBN tidak hanya menjadi tempat lalu lintas orang maupun barang dan jasa melainkan menjadi suatu kutub atau pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan dapat menunjang peningkatan perekonomian di wilayah lokasi PLBN. Berikut analisis fungsi PLBN berdasarkan kesepuluh konsep geoekonomi oleh Soilén (2012).

Pertama, konsep kepercayaan. Pembangunan PLBN memiliki fungsi sekunder diharapkan dapat menciptakan *trickle down effect* terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Dampak tersebut antara lain: 1) Peningkatan mobilitas orang, barang dan jasa, kendaraan antar negara; 2) Peningkatan perekonomian di desa-desa lokasi PLBN dan tempat istirahat di sepanjang jalan yang digunakan kendaraan antar negara; 3) Perluasan peluang ekonomi bagi pelaku usaha di desa-desa kawasan PLBN; 4) Peningkatan arus wisatawan antarnegara, termasuk WNI yang berobat ke Sarawak. Dengan fungsi sekunder PLBN tersebut dapat berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan.

Kedua, konsep posisi. Secara geografis, PLBN memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dengan demikian, lokasi PLBN Aruk dapat menjadi episentrum dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Ketiga, sumber daya. Kawasan perbatasan umumnya kaya akan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk perkembangan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, kawasan PLBN Aruk memiliki kekuatan sumber daya alam yang sangat besar seperti hasil dari

pertanian, perhutanan dan perikanan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu wisata alam seperti Pantai Temajuk dan beberapa wisata lainnya yang telah dipaparkan sebelumnya. Keberagaman destinasi wisata seperti ini sangat potensial bagi Kabupaten Sambas karena sektor ini dapat meningkatkan devisa negara dengan menarik wisatawan agar berkunjung langsung ke tempat wisata di Kabupaten Sambas. Kekayaan sumber daya alam ini juga dapat bermanfaat bagi sumber daya manusia (SDM di wilayah Kabupaten Sambas karena dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi SDM untuk mengelola SDA yang ada.

Keempat, bobot penekanan. Secara demografis, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah sekitar 647,80 ribu jiwa, sehingga kondisi ini disebut sebagai bonus demografi (Wicaksana, 2019). Bonus demografi ini dapat menjadi aset bagi kawasan Kabupaten Sambas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kualitas penduduknya terutama dalam pendidikan, sehingga dapat tercipta sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya di wilayah PLBN Aruk dengan maksimal. Selain sumber daya manusia, kekuatan sumber daya alam juga harus dilakukan proses pengelolaan terlebih dahulu dengan alat produksi yang memadai, agar pada saat dijual ataupun diekspor, nilai produknya akan semakin tinggi. Lokasi perbatasan PLBN Aruk merupakan lokasi yang strategis untuk mengelola sumber daya alam unggulan karena pangsa pasarnya dapat lebih luas.

Kelima, kekuatan. Dalam hal ini, kawasan Kabupaten Sambas memiliki sumber daya alam unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Sambas. Sumber daya alam unggulan tersebut dapat menjadi modal utama dalam menggerakkan kegiatan produksi. Letak Kabupaten Sambas yang memiliki perbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan PLBN Aruk sebagai perantaranya, akan mempermudah pelaku ekonomi dalam akses perdagangan antar negara. Hal ini berarti, kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dan PLBN Aruk mempunyai kemudahan menjangkau lalu lintas perdagangan internasional.

Keenam, struktur. Menurut Hannah (2021) dengan struktur organisasi pemerintah yang baik, maka akan mencerminkan penyelenggaraan birokrasi yang sistematis dan objektifnya suatu perumusan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintahan Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan daerah dan terus bersinergi dengan pihak PLBN Aruk untuk perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Sambas.

Ketujuh, basis. Basis utama dari Kabupaten Sambas yaitu berada pada kawasan PLBN Aruk, di mana terdapat sarana penunjang berupa *Dry Port*. Aspek efektivitas manajemen PLBN dan *Dry Port* mencakup unit pengelola PLBN, guna meningkatkan produktivitas komoditas daerah dan produk komoditas olahan melalui pengembangan kawasan perbatasan (BNPP, 2018).

Kedelapan, keamanan. Dalam rangka menjaga serta membangun kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara, seperti telah tercantum dalam kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai acuan tata kelola batas negara dan wilayah perbatasan yang tertib, aman, dan maju sehingga dapat menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan keamanan perbatasan secara hukum ini juga didukung oleh fungsi primer *CIQS* PLBN, yaitu menjadi tempat bagaimana negara melakukan kontrol terhadap keluar dan masuk barang dan orang dari luar atau dari dalam wilayah teritorial negara, sehingga menyangkut di dalamnya persoalan keamanan dan prosedur imigrasi yang mencakup perlintasan manusia serta berkaitan dengan bea cukai yang berhubungan dengan perlintasan barang untuk meminimalisir resiko barang atau penumpang yang datang dan masuk ke wilayah suatu negara.

Kesembilan, komunikasi. Kabupaten Sambas dan kawasan perbatasan negara Malaysia, masih serumpun baik dalam budaya maupun bahasa, sehingga terdapat kesamaan bahasa dalam berkomunikasi. Dengan begitu masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa melayu apabila ingin melakukan komunikasi di kawasan perbatasan negara Malaysia.

Kesepuluh, ekspansi. Apabila melihat dinamika dan potensi sumber daya di kawasan Kabupaten Sambas, sebagian besar komoditas yang diekspor ke Malaysia melalui PLBN Aruk, masih merupakan bahan mentah yang sehingga nilai jualnya sangat rendah. Kemudian karena, jarak yang sangat jauh dari pusat kota, keterbatasan produk yang dijual, serta harga yang cukup mahal di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas, menjadikan masyarakat beralih untuk membeli produk-produk di Malaysia yang dianggap jauh lebih murah, lengkap, dan kualitas yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan perluasan ekspansi dari negara Malaysia dan melemahkan bahkan akan mematikan produk lokal yang dijual di kawasan perbatasan. Maka dari itu perlu adanya pengembangan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait ekspor produk ini.

## KESIMPULAN

Pembangunan PLBN Aruk di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas merupakan suatu langkah yang baik untuk menangani berbagai masalah di wilayah perbatasan. Keberadaan PLBN tersebut memberikan peluang ekonomi baru melalui peningkatan aktivitas perlintasan batas, perdagangan, dan investasi. Kabupaten Sambas, sebagai wilayah perbatasan, menjadi sentral dalam kaitannya dengan ekonomi regional. Namun, meskipun PLBN Aruk membuka potensi ekonomi baru, tetapi tantangan muncul seiring minimnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana di sekitarnya. Kondisi tersebut menghambat potensi ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat lokal sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kawasan perbatasan secara umum memang memiliki karakteristik tantangan tersendiri dalam pembangunan. Minimnya investasi pada infrastruktur dan fasilitas publik di daerah perbatasan sering kali menjadi kendala utama. Dalam konteks Kabupaten Sambas, hal ini menjadi keterbatasan yang menghambat optimalisasi manfaat ekonomi dari PLBN Aruk. Maka dari itu, untuk mencapai potensi penuh, diperlukan upaya serius dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur. Pembangunan jalan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pembangunan fasilitas publik lainnya akan membuka pintu lebih lebar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Kabupaten Sambas setelah pembangunan PLBN Aruk menunjukkan potensi yang besar, tetapi kendala infrastruktur dan fasilitas masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan komitmen lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk memprioritaskan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 19-32.
- BNPP, (2011). Mengenal PLBN Aruk di Perbatasan RI-Malaysia. Diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/mengenal-plbn-aruk-di-perbatasan-ri-malaysia> pada 15 Juni 2022
- BNPP. (2018). Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN). <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PLBN-BNPP.pdf>

- BPS Kalimantan Barat. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2022*. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/52/188/1/produk-domestik-regional-bruto-kab-kota-atas-dasar-harga-konstan.html>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas. (2021). *Pariwisata dan ekonomi kreatif kab. Sambas (Peluang Dan Tantangan)*. Dok Pemerintah Kab Sambas.
- Firdaus, F. (2019). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Husnadi. (2006). Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus : Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat). Skripsi In Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/4787/>
- Ishak, A.F. (2003). Membangun wilayah perbatasan Kalimantan dalam rangka memelihara dan mempertahankan integritas nasional. Jakarta: Indomedia
- Ismail, I. A., Afendi, A & Ruslan, A. (2022). *Analisis Pendekatan Keynes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Skripsi in UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Diakses dari <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2286>
- JDHIN. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- KEMENKEU. (2020). *Menaruh Asa di Aruk..* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13020/Menaruh-Asa-di-Aruk.html>
- Hutabarat, L.F. (2022) Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief, 7 (8). pp. 1-10.
- Kementerian PUPR. (2022, August 13). *Konstruksi Selesai 100 %, PLBN Terpadu Aruk Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Kalbar*. <https://pu.go.id/berita/konstruksi-selesai-100-plbn-terpadu-aruk-jadi-andalan-pertumbuhan-ekonomi-di-kawasan-perbatasan-kalbar>
- KOMINFO. (2015, August 18). *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
- Lindia Mayona, E., Rahmi Kusmastuti, dan, Paloh, K., Sajingan Besar, K., Jagoi Babang, K., Entikong, K., Sekayam, K., Ketungau Hulu, K., Ketungau Tengah, K., Putussibau, K., Kencana, P., & Lupar, B. (2016). PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *TATALOKA*, 13(2), 119–134. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.13.2.119-134>
- Mariati, W., Yuesti, A., & Paulus Tahu, G. (2022). ECONOMIC GROWTH BASED ON THE KEYNES THEORY. *International Journal of Sustainability, Education, and Global Creative Economic (IJSEGCE)*, 5(2), 2656–3037. <https://doi.org/10.1234/ijsegce.v5i2.204>
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Mufizar, Arkanudin, & M, S. A. (2013). Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. <https://www.neliti.com/id/publications/9398/pembangunan-sosial-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-sajingan-besar-kabupaten-s>
- Nana Syaodih Sukmadinata “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),60

- PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2015, 1 (2015). <https://jdihn.go.id/files/671/PERBAN%20NOMOR%201%20TAHUN%202015.pdf>
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, (2010). [https://admin-jdih.bnpp.go.id/storage/dokumen/PU230406051938\\_lampiran.pdf](https://admin-jdih.bnpp.go.id/storage/dokumen/PU230406051938_lampiran.pdf)
- Priyono, J. (2020). *Geopolitik Geostrategi Geoekonomi*. <https://www.researchgate.net/publication/342438573>
- Purnamasari, Wulan. dkk. (2016). View of PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA MALAYSIA DI SAMBAS. *PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA MALAYSIA DI SAMBAS*, 4(2), 1–31. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/7364/6039](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7364/6039)
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024, (2020). <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- Satono, H. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2019*. <https://sambas.go.id/file/transparansi/transparansi-64.pdf>
- Soilen, K. S. (2012). *Geoeconomics*. Halmstad: Ventus Publishing.
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3, 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA, 1 (2008). [https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150616\\_1906.pdf](https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf)
- Wicaksana, I. G. W. (2014). Tantangan Geoekonomi Global dan Prospek Integrasi Ekonomi ASEAN. *Universitas Airlangga*, 8(2). <https://journal.unair.ac.id/JGS@tantangan-geoekonomi-global-dan-article-10015-media-23-category-8.html>